



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL  
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI

The background features a light blue and white geometric pattern of overlapping lines and shapes, creating a modern, digital aesthetic. A dark blue arrow-shaped graphic points to the right, containing the title text.

# **LAPORAN KINERJA**

# KATA PENGANTAR



Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Direktorat Perundingan Bilateral Menyusun Laporan Kinerja (Lapkin) yang menguraikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja Direktur Perundingan Bilateral Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian hasil kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2025 Direktorat Perundingan Bilateral disusun berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 10 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Kami berharap laporan ini dapat digunakan oleh berbagai pihak terkait dalam menilai kinerja Direktorat Perundingan Bilateral selama Tahun 2025 sehingga dapat menjadi pedoman monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2025 dapat selesai tepat pada waktunya

Jakarta, 30 Desember 2025  
Direktur Perundingan Bilateral

**Danang Prasta Danial**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## 12 PTA/FTA/CEPA di fora bilateral

Jumlah PTA/FTA/CEPA di forum bilateral yang telah diselesaikan sampai dengan tahun 2025 sebanyak 12 perjanjian yaitu: IJEPA, Indonesia-Pakistan PTA, Indonesia-Chile CEPA, Indonesia-Mozambique PTA, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Korea CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Uni Arab Emirates CEPA, Indonesia-Iran PTA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Canada CEPA dan Indonesia-EAEU FTA. sedangkan Perundingan yang telah sampai tahap substansial conclude adalah Indonesia-Tunisia PTA dan Indonesia-EU CEPA. adapun perundingan yang masih dalam tahap proses adalah Indonesia-GCC FTA, Indonesia-Mercosure CEPA dan Indonesia-Turkiye PTA.

## 4 Kesepakatan Kerja sama perdagangan bilateral

Kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral yang dilaksanakan pada tahun 2025 dilakukan pada IETO-TETO, JCM IA-CEPA, serta rangkaian pertemuan BIMP EAGA dan IMT-GT.

## 100% Penyelesaian Dokumen Perdagangan Bilateral

Persentase penyelesaian dokumen awal pengesahan perjanjian perdagangan bilateral dengan negara mitra telah mencapai 100%, dimana dokumen awal ratifikasi Indonesia-Peru CEPA dan Indonesia-Canada CEPA telah diselesaikan pada akhir tahun 2025.

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur Jenderal PPI memberikan mandat melalui perjanjian kinerja kepada Direktur Perundingan Bilateral. Direktorat Perundingan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang di forum perundingan bilateral. Pada tahun 2025, dalam perjanjian kinerja Direktorat Perundingan Bilateral ditetapkan 2 sasaran kinerja dan 3 indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi, yaitu: 1) Jumlah PTA/FTA/CEPA di fora bilateral; 2) Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral ; serta 3) persentase penyelesaian dokumen awal pengesahan perjanjian perdagangan bilateral dengan negara mitra.

**Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2025**

NO	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>A</b>	<b>Meningkatnya akses pasar melalui perundingan perdagangan di forum bilateral</b>				
1	Jumlah PTA/FTA/CEPA di fora bilateral	PTA/FTA/CEPA di fora bilateral	13	12	92,3%
	Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral	Kesepakatan	3	4	133%
<b>B</b>	<b>Meningkatnya efektifitas kebijakan akses pasar dengan negara mitra di fora bilateral</b>				
1	Presentase penyelesaian dokumen awal pengesahan perjanjian perdagangan bilateral dengan negara mitra	Persen (%)	100	100	100
<b>Rata-rata capaian tahun 2025</b>					<b>108,43%</b>
<b>Rata-rata capaian tahun 2024</b>					<b>119,22%</b>

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>4</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>5</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>6</b>
<b><u>BAB I</u></b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>7</b>
<b>TUJUAN</b> .....	<b>8</b>
<b>STRUKTUR ORGANISASI</b> .....	<b>9</b>
<b>TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	<b>10</b>
<b>PERAN STRATEGIS ORGANISASI</b> .....	<b>10</b>
<b><u>BAB II</u></b>	
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>12</b>
<b>RENCANA KERJA</b> .....	<b>14</b>
<b>PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>15</b>
<b><u>BAB III</u></b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>18</b>
<b>KINERJA ANGGARAN</b> .....	<b>28</b>
<b><u>BAB IV</u></b>	
<b>PENUTUP</b> .....	<b>29</b>
<b>REKOMENDASI</b> .....	<b>29</b>

# DAFTAR TABEL

TABEL 1. REALISASI CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL TAHUN 2025 .....	3
TABEL 2. KEGIATAN DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL .....	15
TABEL 3. REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 1 TAHUN 2025 .....	18
TABEL 4. KINERJA ANGGARAN DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL 2025 .....	27

# DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI DPB TAHUN 2025 .....</b>	<b>9</b>
<b>GAMBAR 2. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL TAHUN 2025 .....</b>	<b>16</b>
<b>GAMBAR 3. LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL TAHUN 2025 .....</b>	<b>17</b>
<b>GAMBAR 4. PENANDATANGANAN INDONESIA CANADA-CEPA, 24 SEPTEMBER 2025 DI CANADA .....</b>	<b>20</b>
<b>GAMBAR 5. PENANDATANGANAN INDONESIA-PERU CEPA, 11 AGUSTUS 2025 DI INDONESIA .....</b>	<b>21</b>
<b>GAMBAR 6. PENANDATANGANAN INDONESIA-EAEU FREE TRADE AGREEMENT, 21 DESEMBER 2025 DI RUSIA .....</b>	<b>22</b>
<b>GAMBAR 7. KEGIATAN INDONESIA - GCC , SEPTEMBER 2025 DI BALI INDONESIA.....</b>	<b>24</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu tahapan yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP berupa penghitungan tingkat kemajuan (*progress*) dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja).

Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015. Surat keputusan ini mengamanatkan kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat unit kerja Eselon II dan Satuan Kerja sampai dengan Kementerian, serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan menyampaikan Laporan Kinerja dan melampirkan Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja. Pengukuran Kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian *reward* dan *punishment*, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang berfungsi untuk memberikan informasi bagi pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi dan capaian kerjanya masih dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Permendag Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Perundingan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang di forum perundingan bilateral.

Capaian kinerja Direktorat Perundingan Bilateral tahun 2025 dapat dilihat dengan membandingkan hasil realisasi yang dicapai dengan target yang ditetapkan di awal tahun 2025 di dalam kontrak perjanjian kinerja Direktorat Perundingan Bilateral. Pada tahun 2025, dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral ditetapkan 2 sasaran dan 3 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi serta menjadi acuan dalam penyusunan program kerja dan anggaran.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar di forum perundingan bilateral, Indonesia telah memperkuat perannya yang berorientasi pada peninjauan pengembangan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*, *Free Trade Agreement (FTA)*, *Preferential Trade Agreement (PTA)*, terutama dengan negara non-tradisional.

Perundingan perdagangan bilateral yang telah disepakati dan diimplementasikan diharapkan dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Untuk itu, Direktorat Perundingan Bilateral juga melakukan konsultasi publik bersama pelaku usaha untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang hasil-hasil perjanjian perdagangan bilateral Indonesia dengan negara mitra, yang pada akhirnya dapat bermanfaat secara maksimal bagi pelaku usaha dan perkembangan perekonomian Indonesia.

## TUJUAN

Tujuan dari disusunnya Laporan Kinerja adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Oleh karena itu, pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut dalam satu tahun anggaran.

# STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Perundingan Bilateral

Struktur organisasi Direktorat Perundingan Bilateral terdiri atas:

## a. Subbagian Tata Usaha; dan

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Permendag Nomor 29 tahun 2022 Pasal 170 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Perundingan Bilateral.

## b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah Direktur Perundingan Bilateral dengan 5 (lima) Tim Kerja yang terdiri dari: Tim Afrika dan Timur Tengah, Tim Eropa, Tim Asia Selatan, Tengah dan Timur, Tim Amerika, Tim Implementasi,

## TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Permendag Nomor 29 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Perundingan Bilateral dalam melaksanakan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang di forum perundingan bilateral, dengan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika dan timur tengah;
2. penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang

kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika dan timur tengah;

1. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika, dan timur tengah;
2. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan Bilateral.

## PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Pada tahun 2025, Kementerian Perdagangan mempunyai peran strategis untuk meningkatkan ekspor nasional. Upaya peningkatan ekspor di pasar global adalah melalui penguatan diplomasi perdagangan untuk peningkatan daya saing, penguatan pengembangan produk dan pasar ekspor, sistem informasi yang terintegrasi, ekspansi pasar global melalui sektor niaga, substitusi impor bahan baku, dan penguatan regulasi di sektor perdagangan untuk merespon isu perdagangan hijau dan berkelanjutan. Hal ini menjadi fokus Kementerian Perdagangan dalam penyusunan program kerja dan anggaran. Indonesia terus melakukan peran aktif dalam perundingan perdagangan internasional dengan negara mitra dagang memperjuangkan akses produk agar tetap diterima di pasar internasional.

Hal ini akan membantu perdagangan Indonesia yang sedang berkembang. Apabila jumlah ekspor meningkat, maka cadangan devisa Indonesia akan tetap berada di level yang baik. Perekonomian dunia saat ini berkembang sangat cepat dan Indonesia sebagai negara yang besar harus siap untuk menghadapi persaingan perdagangan dunia yang ketat dengan negara lain. Untuk itu, penting bagi Indonesia agar dapat meningkatkan daya saing salah satunya melalui perundingan dagang dan forum kerja sama bilateral dengan negara mitra dagang. diharapkan dengan adanya CEPA, FTA maupun PTA dengan negara mitra dagang dapat membuka akses pasar barang Indonesia yang luas di luar negeri.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar barang di fora bilateral, Direktorat Perundingan Bilateral melakukan penjajakan perundingan ke negara-negara non tradisional serta terus melanjutkan berbagai perundingan dan kerja sama dengan negara mitra yang masih belum selesai. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional selama tahun 2025 telah memberikan kontribusi dalam bentuk 3 perjanjian perdagangan yaitu perjanjian Indonesia - Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) Indonesia - Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement IP-CEPA dan Indonesia - Erurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU CEPA). selain itu penyelesaian secara substansi dalam perjanjian bilateral adalah Indonesia - European Union (IEU-CEPA) dan Indonesia Tunisia FTA.

Dengan disepakati dan diberlakukannya beberapa perjanjian tersebut, Direktorat Perundingan Bilateral memiliki peran yang signifikan dalam mendukung capaian organisasi dan mandat Presiden meningkatkan ekspor melalui pembukaan akses pasar melalui perjanjian perdagangan internasional. Dengan adanya perjanjian perdagangan bilateral kepada negara mitra dagang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam negeri yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekspor Indonesia, menjaga perdagangan dan meningkatkan devisa negara.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Direktorat Perundingan Bilateral meningkatkan perannya dalam negosiasi perjanjian dan kerja sama bilateral dengan negara mitra dagang. Tujuan negosiasi perjanjian dan kerja sama bilateral yang dilakukan mencakup meningkatkan pasar produk ekspor non-migas, optimalisasi upaya pengamanan perdagangan dan Upaya peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap hasil-hasil kesepakatan perjanjian perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Prio

PRIORITAS NASIONAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2025-2029 UNTUK DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KHUSUSNYA DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL MASUK DALAM PRIORITAS NASIONAL LIMA (5) YAITU “**MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI**”

Asta cita sebagai prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia-Emas 2045.

Selanjutnya, untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan sebagaimana dikemukakan pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029, memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan yaitu:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri: Memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan ekspor non migas, dan memanfaatkan produk UMKM di pasar global
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri: Pengamanan pasar domestik, stabilisasi harga, serta menjamin ketersediaan bahan pokok (seperti minyak goreng)
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik: meningkatkan integritas, profesionalisme, dan efisiensi birokrasi di sektor perdagangan.

## Fokus Strategis 2025 :

1. Stabilitas Harga: pengawasan ketat terhadap distribusi barang pokok.
2. Perlindungan Industri: menggunakan mekanisme safe guard terhadap produk impor
3. Digitalisasi: pengembangan resi gudang dan pasar lelang komoditas

program-program ini didukung oleh kebijakan yang inline untuk memperkuat kewirausahaan dan mendigitalisasi sektor perdagangan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia serta misi Kementerian Perdagangan, Ditjen PPI mengemban 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. meningkatkan akses pasar Indonesia di pasar Internasional melalui perundingan perdagangan internasional;
2. Menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan Internasional;
3. Melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil;
4. Mendorong Implementasi hasil - hasil perundingan perdagangan internasional dalam tata aturan nasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
5. Mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan dan perjanjian perdagangan internasional sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Perdagangan dan misi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, maka Direktorat Perundingan Bilateral mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan. fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik, Eropa, Amerika, Afrika dan Timur Tengah;

2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerjasama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara kawasan Asia, Pasifik, Eropa, Afrika dan Timur tengah;
3. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik, Eropa, Amerika, Afrika, dan Timur tengah;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan Bilateral.

Keterkaitan atas visi, misi, fungsi Direktorat Perundingan Bilateral kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja yang mencakup dua sasaran kinerja, yaitu :  
(i) meningkatnya akses pasar barang di pasar internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktek perdagangan internasional yang tidak adil; (ii) Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan.

## RENCANA KERJA

Sebagai turunan dari Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2025–2029, disusun Rencana Kerja Direktorat Perundingan Bilateral tahun 2025 untuk menjabarkan perencanaan kegiatan dan kinerja pada tahun 2025. Untuk mencapai sasaran kinerja Direktorat Perundingan Bilateral membagi indikator kinerja menjadi tiga indikator sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja Direktur Perundingan Bilateral sebagai berikut:

1. Jumlah PTA/FTA/CEPA di fora bilateral
2. Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral
3. Presentase penyelesaian dokumen awal pengesahan perjanjian perdagangan bilateral dengan negara mitra.

Tiga indikator kinerja tersebut mendapatkan alokasi anggaran T.A 2025 sebesar Rp. 2.608.672.000 dengan nilai realisasi mencapai 99,90% yaitu sebesar Rp. 2.535.530.000

Tabel 2. Kegiatan Direktorat Perundingan Bilateral

Indikator Kinerja	Target Kinerja
Jumlah PTA.FTA/CEPA di fora bilateral	13 Perjanjian
Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral	3 Kesepakatan
Presentase penyelesaian dokumen awal pengesahan perjanjian perdagangan bilateral dengan negara mitra	100 Persen
Jumlah Anggaran Awal	Rp. 2.608.672.000,-
Total Realisasi anggaran	Rp. 2.606.136.470,-

Sumber: Perkin DPB (2025)

## PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Direktur Perundingan Bilateral dengan Direktur Jenderal PPI dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja menggambarkan target kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam pelaporan kinerja Direktorat Perundingan Bilateral tahun 2025, di mana secara keseluruhan terdapat 2 sasaran dengan 3 indikator yang telah ditetapkan.

# Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2025



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Jalan. M.J. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110  
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610  
www.kemendag.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
NOMOR PR.02.01 / 519 / PPI-S / PERKIN / 12 / 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danang Prasta Danial  
Jabatan : Direktur Perundingan Bilateral

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono  
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua

Djatmiko Bris Witjaksono

Pihak Pertama

Danang Prasta Danial

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2025

# Lampiran Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2025


## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL

### KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN BILATERAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan perdagangan di forum bilateral	Jumlah PTA/FTA/CEPA di fora bilateral	PTA/FTA/CEPA (Kumulatif)	13
		Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral	Kesepakatan	3
2	Meningkatnya efektivitas kebijakan akses pasar dengan negara mitra di fora bilateral	Persentase penyelesaian dokumen awal pengesahan perjanjian perdagangan bilateral dengan negara mitra	Persen (%)	100

Jakarta, 29 Desember 2025

Direktur Jenderal  
Perundingan Perdagangan Internasional



Djatmiko Bris Witjaksono

Direktur Perundingan Bilateral ↑



Danang Prasta Danial

Gambar 3. Lampiran Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2025

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PPI 2025-2029 dan perjanjian kinerja pada tahun 2025, Direktorat Perundingan Bilateral menetapkan 2 Sasaran Kegiatan yang akan diukur melalui 3 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Seperti halnya pada tahun sebelumnya, pengukuran capaian kinerja tahun 2025 juga dilakukan dengan membandingkan target yang seharusnya dicapai dengan realisasinya.

### Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya akses pasar melalui perundingan perdagangan di forum bilateral

Tabel 3. Realisasi dan capaian indikator kinerja 1 tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah PTA/FTA/CEPA di fora bilateral	13	12	92,3%
Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral	3	4	133,3%

Sampai tahun 2025, Direktorat Perundingan Bilateral melaksanakan beberapa perundingan dengan negara mitra dagang dan menyelesaikan 12 perjanjian PTA/FTA/CEPA. Target indikator 1 (satu) tidak tercapai dengan target 13 perjanjian dan realisasi akumulasi jumlah PTA/FTA/CEPA di fora bilateral sebanyak 12 perjanjian dengan capaian 92,3%. Hal tersebut berada di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2025. Namun terdapat 2 perjanjian secara substansi perundingan telah selesai namun belum ditandatangani seperti Indonesia-EU CEPA dan Indonesia-Tunisia PTA.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{12}{13} \times 100\% = 92,3\% \end{aligned}$$

< < < < < < < < < < < <

Untuk target indikator kinerja satu (1) tidak tercapai dikarenakan, Penandatanganan Indonesia EU CEPA belum bisa dilakukan karena proses *legal scrubbing* dan penerjemahan teks perjanjian melibatkan seluruh negara anggota EU. Sedangkan terkait Indonesia-Tunisia CEPA, perundingan dan *legal scrubbing* telah selesai, dan *Memorandum of Understanding* (MoU)/Nota Kesepahaman Kerja Sama Halal telah disepakati. Namun demikian, dalam perkembangannya, Tunisia meminta penyesuaian komitmen sehingga penandatanganan Indonesia-Tunisia PTA tertunda. Meskipun capaian indikator kinerja hanya sebesar 92%, Direktorat Perundingan Bilateral telah berhasil menyelesaikan perundingan secara substansial untuk 2 perjanjian dimaksud pada tahun 2025.

## **Perundingan Perdagangan Bilateral Tahun 2025**

Pada tahun 2025, Direktorat Perundingan Bilateral melaksanakan target kinerja untuk memperluas akses perdagangan internasional Indonesia dengan melakukan berbagai negosiasi bilateral dengan negara mitra dagang. Perundingan yang dilakukan pada tahun 2025 memiliki perkembangan signifikan dan berhasil menyelesaikan 3 (tiga) perjanjian, antara lain: Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Canada CEPA, dan Indonesia-EAEU CEPA. Sedangkan terdapat dua perundingan yang telah sampai pada tahap penyelesaian secara substansial, yaitu Indonesia-Tunisia PTA dan Indonesia-EU CEPA. Adapun tiga perundingan yang masih dalam tahap proses adalah Indonesia-GCC FTA, Indonesia-Mercosur CEPA dan Indonesia-Turkiye PTA. Sehingga jumlah PTA/FTA/CEPA yang telah diselesaikan sampai dengan tahun 2025 sebanyak 12 (dua belas) perjanjian, yaitu: IJEPA, Indonesia-Pakistan PTA, Indonesia-Chile CEPA, Indonesia-Mozambique PTA, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Korea CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Uni Arab Emirates CEPA, Indonesia-Iran PTA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Canada CEPA dan Indonesia-EAEU FTA. Selain itu, Direktorat Perundingan Bilateral juga melaksanakan perundingan kerja sama perdagangan dengan negara mitra dagang dalam rangka memperkuat kerja sama perdagangan barang dan jasa serta investasi, mengamankan pasar ekspor Indonesia, dan pemantauan implementasi perjanjian dagang yang telah berjalan antara lain, BIMP-EAGA Trade and Investment Facilitation and Promotion Cluster (TIFPC) Meeting, Working Group on Trade Investment Facilitation Indonesia-Malaysia-Thailand (WGTI-IMT-GT), Working Group on Trade (WGT) of the 12th Joint Committee on Trade and Investment between Indonesian Economic and Trade Office and Taipei Economic and Trade Office (JCTI-12 IETO-TETO), dan Joint Committee Meeting Indonesia-Australia CEPA. Adapun beberapa poin penting perundingan yang telah dilaksanakan Direktorat Perundingan Bilateral sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

## 1. Indonesia - Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement

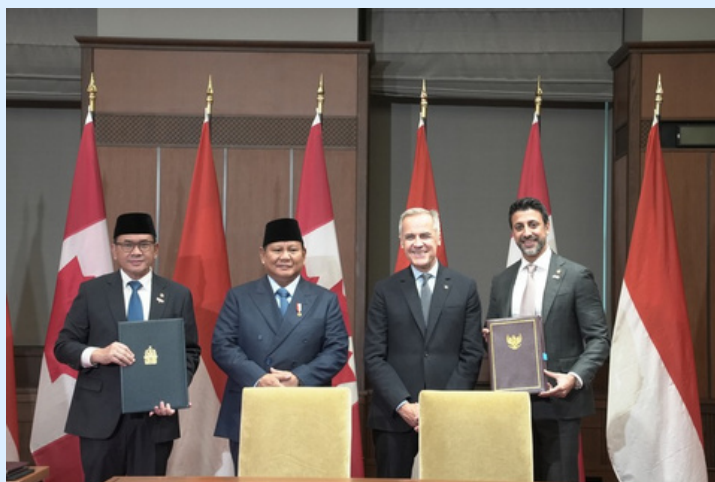
Pada tahun 2025, kedua negara telah menyepakati 12 (dua belas) teks Chapter dari total 13 (tiga belas) teks Chapter, yaitu: (i) Cooperation; (ii) Sanitary and Phytosanitary; (iii) Technical Barrier to Trade; (iv) National Treatment and Market Access for Goods; (v) Final Provisions; (vi) Transparency; (vii) Institutional Provisions; (viii) Initial Provisions and General Definitions; (ix) General Provisions and Exceptin; (x) Trade Remedies; (xi) Dispute Settlement; (xii) Custom Procedures and Trade Facilitation. Selanjutnya, **Indonesia-Peru CEPA telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru pada 11 Agustus 2025 di Jakarta.** Indonesia-Peru CEPA dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk rencana akses Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).



Gambar 4. Penandatanganan Indonesia-Peru CEPA, 11 Agustus 2025 di Indonesia

## 2. Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA)

Perundingan ICA-CEPA selesai di Putaran Kesepuluh pada November 2024. Penyelesaian perundingan diumumkan oleh Kepala Negara Indonesia dan Kanada di sela-sela APEC Economic Leaders' Week pada 15 November 2024 di Lima, Peru, dilanjutkan dengan penandatanganan Pernyataan Bersama oleh kedua Menteri Perdagangan pada 2 Desember 2024 di Jakarta. Proses legal scrubbing dan penerjemahan dimulai sejak 3 Desember 2024 dan telah selesai pada awal Juni 2025. Selanjutnya **ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada pada 24 September 2025 di Ottawa, Kanada**. Perjanjian ICA-CEPA merupakan perjanjian perdagangan bilateral pertama Indonesia dengan mitra di kawasan Amerika Utara. Sekaligus perjanjian bilateral pertama Kanada dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menandai tonggak penting dalam diplomasi ekonomi dan perdagangan Indonesia di kawasan Amerika Utara.



Gambar 5. Penandatanganan Indonesia Canada-CEPA, 24 September 2025 di Canada

### 3. Indonesia - EAEU Free Trade Agreement (IEAEU-FTA)

Joint Announcement penyelesaian Perundingan IEAEU-FTA telah dilaksanakan pada 19 Juni 2025 di St. Petersburg oleh Menko Bidang Perekonomian RI dan Menteri Perdagangan Eurasian Economic Commission (EEC). Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan EAEU telah melaksanakan proses legal scrubbing teks perjanjian pada 9-11 September 2025. **Penandatanganan Perjanjian IEAEU-FTA dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2025. yang dilakukan di St. Petersburg, Rusia.** Penandatanganan dalam rangkaian pertemuan Dewan Tinggi Uni Ekonomi Eurasia (*Supreme Council Meeting*). Yang dipimpin langsung oleh Presiden Federasi Rusia dan disaksikan langsung oleh para kepala negara anggota Uni Ekonomi Eurasia. Persetujuan I-EAEU FTA merupakan persetujuan perdagangan bilateral pertama Indonesia dengan kawasan ekonomi yang mencakup negara-negara lintas kawasan Eropa dan Asia, sekaligus persetujuan dagang kedua Indonesia dengan negara di kawasan Eropa setelah European Free Trade Association (EFTA). Hal ini meningkatkan posisi strategis Indonesia di kawasan secara politik dan ekonomi, serta eksposur Indonesia dalam rantai pasok global.



Gambar 6. Penandatanganan Indonesia-EAEU Free Trade Agreement, 21 Desember 2025 di Rusia

#### 4. Indonesia - Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA)

**Indonesia-Tunisia telah menyelesaikan keseluruhan substansi perundingan pada 13 Maret 2025.** Kedua pihak berhasil menyepakati penghapusan dan penurunan tarif bea masuk terhadap 249 pos tarif. Selain itu, telah disepakati mengenai pengaturan *Product Specific Rules* (PSR) dalam pengaturan Rules of Origin terhadap 45 pos tarif yang mencakup produk tekstil, garmen, dan alas kaki. Perundingan IT-PTA telah dilaksanakan sebanyak 3 putaran perundingan dan 11 intersesi, serta berhasil menyelesaikan pembahasan teks utama IT-PTA (Trade in Goods) dan teks Rules of Origin (ROO). Saat ini, Indonesia telah mengusulkan penandatanganan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA) dan Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Halal Quality Assurance pada semester pertengahan tahun 2026 di Bali, Indonesia. Kedua negara sepakat untuk menyelenggarakan Forum Bisnis Indonesia-Tunisia di sela-sela penandatanganan IT-PTA.

#### 5. Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA)

Pada 2025, telah dilaksanakan rangkaian pertemuan di tingkat Chief Negotiators (CNs) dan teknis (Working Group) dalam rangka mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia-EU CEPA. **Penyelesaian substansi perundingan secara resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Commissioner for Trade and Economic Security, Interinstitutional Relations and Transparency, European Commission pada tanggal 23 September 2025 di Bali, Indonesia.** Pasca selesainya seluruh substansi perjanjian, kedua negara melanjutkan proses legal scrubbing, translasi dan proses domestik lainnya untuk mempercepat proses pengesahan perjanjian. Kedua pihak menargetkan penandatanganan Indonesia-EU CEPA dapat dilaksanakan pada tahun 2026.

## 6. Indonesia - Gulf Cooperation Country Free Trade Agreement (I-GCC FTA)

Perundingan putaran ketiga *Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement (I-GCC FTA)* telah diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 1-5 September 2025 di Indonesia. Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Perundingan Bilateral, Kementerian Perdagangan, selaku Ketua Tim Perunding, dan delegasi GCC dipimpin oleh Mr. Raja Munahi Al-Marzoqi, General Coordinator for Free Trade Agreement Negotiations, GCC Secretariat, selaku Ketua Tim Perunding. Perundingan membahas 13 (tiga belas) isu runding. Pembahasan teks perjanjian Indonesia-GCC FTA telah mencapai perkembangan yang cukup signifikan, hingga mencapai 63,5% dari keseluruhan isu perundingan. Perundingan putaran keempat I-GCC FTA akan dilaksanakan di Riyadh pada awal tahun 2026.



Gambar 7. Kegiatan Indonesia - GCC , September 2025 di Bali Indonesia

## 7. Indonesia - Turkiye PTA

Direktorat Perundingan Bilateral telah melakukan pertemuan dengan Mr Hakan Akgun, Deputy Director General International Agreements and European Union, Kementerian Perdagangan Turki, pada tanggal 25 September 2025 dan dihadiri oleh Atase Perdagangan Ankara. Pertemuan membahas rencana Perundingan Indonesia-Turkiye PTA, menindaklanjuti kesepakatan Kepala Negara dan Menteri Perdagangan kedua pihak yang berambisi untuk meningkatkan perdagangan hingga USD 10 miliar. Sebagai informasi, pada tahun 2024, total perdagangan tercatat USD 2,4 miliar, di mana ekspor Indonesia USD 1,9 miliar dan impor Indonesia USD 461,6 juta. Pertemuan bersifat eksploratif dan menjajaki aspirasi kepentingan kedua pihak.

## 8. Working Group on Trade Investment Facilitation Indonesia-Malaysia-Thailand (WGTI-IMT-GT)

Pertemuan ke-18 Working Group on Trade Investment Facilitation Indonesia-Malaysia-Thailand (WGTI-IMT-GT) telah dilaksanakan secara daring pada 9 Juli 2025. Direktur Perundingan Bilateral memimpin delegasi RI dan bertindak selaku ketua serta tuan rumah pertemuan dimaksud. Pertemuan membahas antara lain Mid-Term Review (MTR) Implementation Blueprint, kemajuan pelaksanaan IB 2022-2026 dengan fokus pada fasilitasi perdagangan dan investasi, hasil pertemuan Sub Working Group (SWG) dibawah WGTI, pembahasan kerja sama dengan JBC dan UNINET dan persiapan untuk Senior Official Meeting ke-32 dan Ministerial Meeting ke-31 IMT-GT.

## **9. BIMP-EAGA Trade and Investment Facilitation and Promotion Cluster (TIFPC) Meeting**

Pertemuan 12th BIMP-EAGA Trade and Investment Facilitation and Promotion Cluster (TIFPC) telah dilaksanakan pada 10–11 September 2025 di Brunei Darussalam. Kami memimpin pertemuan sebagai Chair TIFPC periode 2025–2027 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina), BIMP-EAGA Facilitation Center (BIMP-FC), serta BIMP-EAGA Business Council (BEBC). 2. Pertemuan membahas perkembangan implementasi Rolling Pipeline of Projects (RPoP) 3 periode 2023–2025, usulan proyek baru, inisiatif konvergen, dan penyusunan BIMP-EAGA Vision (BEV) 2035 untuk klaster TIFPC. TIFPC perlu memastikan keselarasan sektor perdagangan dan investasi dengan BEV 2035 melalui perumusan outcome, output, prioritas strategis, dan indikator kinerja. Indonesia menekankan pentingnya sinergi dengan RPJPN 2045, penguatan lintas-klaster, peran UMKM, serta penyampaian usulan BEV 2035 ke ADB paling lambat 18 September 2025. Selain itu, Indonesia akan menjadi tuan rumah sekaligus Ketua pada pertemuan TIFPC ke-13 yang direncanakan September 2026, dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian.

## **10. Working Group on Trade JCTI-12 IETO-TETO**

Pertemuan Working Group on Trade (WGT) of the 12th Joint Committee on Trade and Investment between Indonesian Economic and Trade Office and Taipei Economic and Trade Office (JCTI-12 IETO-TETO) telah dilaksanakan pada 17 November 2025 secara hybrid. Terdapat beberapa isu yang telah diselesaikan yaitu pembahasan MoU on Trade Promotion Cooperation dan MoU on Halal Cooperation. Kedua MoU akan ditandatangani pada Pertemuan JCTI-12 IETO-TETO di Indonesia.

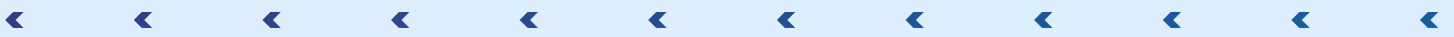
## 11. Joint Committee Meeting Indonesia-Australia CEPA

Australia telah menyampaikan usulan agenda JCM-3 yang mencakup: (i) Overview perdagangan dan investasi Indonesia-Australia; (ii) Penyampaian laporan Komite (Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa, Investasi, Kerja sama Ekonomi) dan Sub Komite (SPS dan ROO); (iii) isu sertifikasi halal; dan (iv) General Review IA-CEPA. Hasil pertemuan Presiden RI dengan PM Australia pada 15 Mei 2025 telah menegaskan komitmen kedua negara untuk perluasan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik IA-CEPA, dengan membuka peluang pengembangan perluasan komitmen di sektor prioritas (energy transition, critical mineral, e-commerce/digital trade). Australia mengusulkan agar kedua negara dapat mulai mengidentifikasi peluang perluasan perjanjian di sektor prioritas.

### **\*Penyelesaian dokumen awal pengesahan perjanjian perdagangan bilateral dengan negara mitra\***

#### 1. Ratifikasi dokumen Perjanjian Indonesia - Peru CEPA

Persetujuan dengan Peru merupakan Persetujuan perdagangan bilateral kedua Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Selatan dan yang pertama ditandatangani pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penandatanganan Persetujuan ini menjadi tonggak sejarah hubungan kerja sama kedua pihak sekaligus memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto agar perundingan diselesaikan secepat mungkin dengan tetap menjaga kepentingan nasional Indonesia. Untuk mendapatkan manfaat dari Persetujuan ini, Indonesia harus melakukan proses pengesahan (ratifikasi) dan menotifikasi ke pihak Peru. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, setiap perjanjian perdagangan internasional disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan diputuskan oleh DPR mengenai bentuk hukum pengesahannya. I-P CEPA terdiri atas 13 bab dan 175 pasal yang mengatur hal-hal pokok. Pada tahun 2025, Direktorat Perundingan Bilateral telah menyelesaikan seluruh dokumen awal yang dibutuhkan dalam proses pengesahan Indonesia-Peru CEPA



## 2. Ratifikasi Dokumen Perjanjian Indonesia - Canada CEPA

I- CA CEPA merupakan Persetujuan perdagangan bilateral pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara, sementara Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi mitra dagang bilateral Kanada. Penandatanganan I-CA CEPA ini menjadi tonggak sejarah hubungan kerja sama kedua negara. Untuk mendapatkan manfaat dari I-CA CEPA, Indonesia dan Kanada harus melakukan proses pengesahan (ratifikasi) dan notifikasi kepada masing-masing pihak. Dalam hal ini, bagi Indonesia, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, setiap perjanjian perdagangan internasional disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan diputuskan oleh DPR mengenai bentuk hukum pengesahannya. Adapun selanjutnya, apabila telah diputuskan bentuk hukum pengesahannya, proses pengesahan akan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. I-CA CEPA terdiri atas 26 (dua puluh enam) Bab, 518 (lima ratus delapan belas) Pasal, dan 3 (tiga) Lampiran, yang mengatur hal-hal pokok. Pada tahun 2025, Direktorat Perundingan Bilateral telah menyelesaikan seluruh dokumen awal yang dibutuhkan dalam proses pengesahan Indonesia-Canada CEPA

### KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Direktorat Perundingan Bilateral memiliki anggaran sebesar Rp. 2.608.672.000,-. DPB telah merealisasikan anggaran sebesar 99,90% atau sekitar Rp. 2.606.136.470,-. Berikut ini penjabaran realisasi dari masing-masing indikator kinerja:

**Tabel 4. Kinerja Anggaran Direktorat Perundingan Bilateral 2025**

No	Indikator Kinerja	Pagu Awal	Realisasi	Presentase
1	Jumlah PTA/FTA/CEPA di fora bilateral	1.156.759.000	1.156.629.802	99,99%
2	Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral	1.404.640.000	1.402.348.818	99,84%
3	Presentase penyelesaian dokumen awal pengesahan perjanjian perdagangan bilateral dengan negara mitra	47.273.000	47.157.850	99,71%
Total		2.608.672.000	2.606.136.470	99,90%

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa, realisasi anggaran dari seluruh indikator kinerja DPB memiliki realisasi sebesar 99,90%. dengan urutan realisasi anggaran di posisi pertama sebesar 99,99% atau senilai Rp. 1.156.629.802 untuk Indikator Kinerja Jumlah PTA/FTA/CEPA di fora bilateral. dilanjutkan dengan posisi kedua sebesar 99,84% atau senilai Rp. 1.402.348.818 untuk Indikator Kinerja Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral . Dan di posisi ketiga sebesar 99,71% senilai Rp. 47.157.850 untuk Indikator Kinerja Presentase penyelesaian dokumen awal pengesahan perjanjian perdagangan bilateral dengan negara mitra.

## BAB IV PENUTUP

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tahun 2025 yang telah diperjanjikan, kinerja Direktorat Perundingan Bilateral pada tahun 2025 dapat dikatakan SANGAT BAIK dan MEMUASKAN. Meskipun target indikator kinerja “Jumlah PTA/FTA/CEPA di fora bilateral” hanya dapat diselesaikan sebanyak 12 dari 13 perjanjian secara kumulatif, terdapat 2 perjanjian yang perundingannya telah diselesaikan secara substansial.

Pada tahun 2025, rata-rata capaian dari 3 (tiga) indikator kinerja adalah 108,5%. Hal ini tentunya melebihi target yang telah diperjanjikan. Pada sisi kinerja anggaran, pada tahun 2025, Direktorat Perundingan Bilateral mengalami peningkatan dari sisi anggaran sebesar 99,90% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya mencapai 99,55%.

### REKOMENDASI

Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026 agar dapat dilakukan pengoptimalan rincian output (RO). lebih teliti dan cermat dalam menetapkan strategi pencapaian target kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan faktor lainnya seperti perubahan alokasi anggaran tahun berjalan. Meskipun penyusunan rencana pelaksanaan program atau kegiatan telah dilakukan dengan cukup cermat, namun adanya *automatic adjustment* anggaran menyebabkan penyesuaian terhadap program/kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Perundingan Bilateral, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian target kinerja yang sesuai anggaran setelah *automatic adjustment*. dan dengan adanya pengoptimalan RO, pada triwulan IV diharapkan pengotimalan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Untuk memudahkan dalam pemantauan kinerja, agar dari masing-masing indikator yang ditetapkan perlu adanya pemantauan pencapaian target secara periodik/triwulan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan perlu dilakukannya tindakan preventif dengan pengoptimalan manajemen risiko sehingga setiap pelaksanaan program/kegiatan dari target kinerja per indikator kinerja dapat terpantau dengan baik. Dengan dilakukan tindakan proaktif manajemen risiko diharapkan pada akhir tahun anggaran capaian kinerja seluruh indikator kinerja dapat tercapai jauh melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan.

# LAPORAN KINERJA 2025

Disusun oleh  
Direktorat Perundingan Bilateral

Direktorat Perundingan Bilateral  
Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional  
Kementerian Perdagangan  
Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5 Gambir  
Jakarta Pusat  
Gedung 2 Lt. 8  
Telp.021-3442576  
Email : ditperundinganbilateral@gmail.com